



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dua Pejabat, Konsultan dan Kontraktor Diperiksa Kejari

BENGKULU - Sempat meredup, Kejari Bengkulu kembali menggeber penyelidikan dugaan pemerasan sebagaimana dilaporkan Amirudin, kontraktor pembangunan Alun-Alun Berendo di kompleks Masjid Akbar At Taqwa di Anggut Atas. Itu dibuktikan dengan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dua pejabat Pemkot Bengkulu, kemarin (20/1) pagi. Keduanya, Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Beni Irawan yang saat ini Sekretaris BPBD Kota Bengkulu, dan Kadis PUPR Kota Bengkulu, Noprisman.

Selain kedua pejabat tersebut penyidik Kejari Bengkulu juga melakukan pemeriksaan Direktur CV. Civarligma Engineering, Endri Agustomi, konsultan pengawas proyek tersebut. Tak ketinggalan, kontraktor proyek Alun-Alun Amirudin Mutaza, kuasa Direktur PT. Karya Duta Mandiri Sejahtera. Mereka diperiksa di ruang berbeda. Amirudin di ruangan Datun, Endri Agustomi diperiksa di ruangan pemeriksaan. Lalu Noprisman diperiksa di ruangan Intel serta Beni Irawan diperiksa di ruangan Pidsus.

Endri Agustomi dikonfirmasi RB usai pemeriksaan mengatakan kehadirannya ke Kejari Bengkulu memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait laporan Amirudin. Ditanya soal pemerasan, Endri membantah adanya permintaan uang dari proyek tersebut seperti yang dilaporkan Amirudin. "Hanya klarifikasi, tidak ada yang lain," tegasnya.

Sementara Amirudin membenarkan pemanggilannya terkait penyelidikan atas laporan yang dilayangkannya ke Jampidsus Kejangung RI. "Ya, penyidik cuma menanyakan itu pada saya. Saya sudah jelaskan semua tadi pada penyidik," ucap Amirudin.

Dikatakan Amirudin, penyidik Kejari Bengkulu ingin memastikan kebenaran laporannya ke Jampidsus Kejangung RI beberapa waktu lalu. Dimana dalam laporan tersebut ia menyebut telah diperas oleh beberapa oknum pejabat Pemkot Bengkulu yang meminta uang hingga Rp 2 miliar lebih. Proyek Alun-alun Barendo yang anggarannya Rp 20 miliar tersebut bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT. Karya Duta Mandiri Sejahtera, diputus kontrak oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu. Alasannya realisasi pekerjaan yang tidak tuntas.

"Tidak tuntasnya pekerjaan tersebut dikarenakan pemerasan ini. Selain itu pengajuan pencairan juga dipersulit, sehingga dampaknya pada pekerjaan tidak terselesaikan sesuai kontrak," jelas Amirudin.

Sayangnya terkait pemeriksaan empat orang tersebut, Kejari Bengkulu belum mau memberikan keterangan. Sehingga belum didapat hasil dari klarifikasi oleh masing-masing pihak yang hadir memenuhi panggilan Kejari Bengkulu. (aba)